



RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

Tentang RUU Praktik Psikologi
Komisi X DPR RI – APSI Pusat

SEJARAH Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia

- ▶ Merupakan Asosiasi Psikologi dibawah HIMPSI yang ke 8
- ▶ Berdiri tgl 17 Desember tahun 2003
- ▶ Jumlah anggota saat ini 395 (Feb 2021)
- ▶ Jumlah perwakilan APSI ada 34 wilyah



1. Substansi yang perlu diatur dalam UU terkait praktik psikologi

Praktek Psikologi Sekolah yang berorientasi pada perkembangan proses belajar peserta didik dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi – Melakukan pemeriksaan psikologi, asesmen, evaluasi dan intervensi . Misalnya untuk seleksi kesiapan belajar masuk SD, maka yang melakukan asesmen adalah asisten psikologi. Dan yang membuat laporan dan yang menentukan siswa diterima /tidak diterima adalah psikolog. Untuk SMA seperti menentukan pemilihan jurusan dan untu PT untuk menentukan bimbingan karier

Siapa saja yang melakukannya?

1. Asisten Psikologi (sarjana psikologi). Kasus apapun yang terkait dengan pemeriksaan psikologi, dan asisten psikolog ini yang menjalnakan asesmen sampai dengan mentabulasi datanya. Atau melakukan intervensi dari program yang dibuat oleh psikolog
2. Psikolog (lulusan magister profesi yang memiliki SIPP) Kasus yang ditangani kasus Bimbingar Karier, Hambatan belajar , Pemilihan jurusan, Anak berkebutuhan khusus (ADD , ADHD)
3. Psiolog praktik dengan keahlian khusus (konsultan) Kesulitan belajar akibat gangguan konsentrasi



2. Apakah substansi dan rumusan dalam pasal Ketentuan Umum sudah tepat?

a. Filosofi praktik psikologi -> **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Misal melihat bagaimana cara orang tua mendampingi anak (*parenting*), contohnya melihat kebingungan orang tua dalam mendampingi proses belajar anak di masa pandemic

b. Perlu penjelasan di ketentuan umum mengenai masing-masing tenaga psikologi

c. Perlu suatu organisasi yang mengelola semua asosiasi ikatan yaitu HIMPSI.

→ Dalam hal ini adanya perwakilan asosiasi di daerah seperti APSI Jabar, ASPI SUMUT, APSI DIY, dll yang secara organisasi diatur oleh HIMPSI Wilayah



3. Bagaimana pengaturan tata kelola penjaminan mutu praktik psikologi yang tepat berdasarkan kondisi saat ini?

1. Mengatur standar kompetensi, di APSI sendiri melakukannya dengan:
 - Webinar rutin (setiap bulan 2 kali)yang diisi oleh perwakilan daerah secara bergantian
 - Menentukan standar, asesmen seperti saat ini sedang dilakukan penentuan standar asesmen untuk mengidentifikasi ABK
 - *Case Conference*
2. Perlu diatur uji kompetensi, saat ini APSI turut serta dalam pengujian kompetensi di LSP Psikologi Indonesia. Jika UU ini sudah disahkan maka APSI mohon agar APSI dilibatkan dalam uji kompetensi di HIMPSI
3. Mengatur mekanisme SIPP

Saat ini sudah ada mekanisme SKP di HIMPSI. Mendapatkan SKP melalui kegiatan anggota, misal mengikuti webinar, workshop dll. Tujuannya untuk mendapatkan SIPP. Mekanisme ini dapat dilanjutkan jika UU sudah disahkan.



4. Pengaturan apa yang dibutuhkan, khususnya mengenai kelembagaan, kemitraan, dan pembiayaan?

Setiap APSI perwakilan daerah diberikan kewenangan dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar. APSI bekerja sama dengan DIKNAS PENDIDIKAN wilayah II Jakarta Barat, DIKNAS PENDIDIKAN Makasar (Seminar untuk guru dan ortu mengenai pembelajarn selama Daring), Biro konsultasi Dwipaya (menyelenggarakan lomba literasi se Indonesia) , Kemen Diknas memberi masukan dalam penyusunan pedoman pencegahan narkoba.

APSI pusat cukup berkoordinasi dengan ketua APSI perwakilan yang dibawah HIMPSI Wilayah dalam hal Keanggotaan, Pelantikan pengurus perwakilan dan Jika ditemui adanya pelanggaran atau hal-hal yang di luar prinsip yang dilakukan oleh anggota APSI di perwakilan daerah

Pembiayaan selama ini dapat diterima dari anggota , dan melakukan seminar ataupun workshop terkait pengembangan keterampilan memberi pelayanan psikologi. Belum ada pengaturan terkait standarisasi pembiayaan



5. Sejauh mana layanan praktik psikologi dilaksanakan di Indonesia dan bagaimana mutu SDM dan layanannya?

Jumlah Psikolog sekolah terbatas di daerah, sehingga di sekolah ada yang praktik dari luar tenaga sekolah. Akibatnya layanannya menjadi terbatas.

Pada daerah yang terbatas psikolognya, dibantu tenaga psikologi (asisten psikolog dan praktisi psikologi)



6. Apakah pengaturan mengenai praktik psikologi dibutuhkan oleh Lembaga Layanan Praktik Psikologi di daerah?

Praktik psikologi dibutuhkan oleh semua Lembaga Layanan Praktik Psikologi di daerah. Misal, di daerah terbatas jumlah psikolog yang memiliki kewenangan untuk melakukan diagnosa dengan menggunakan alat pemeriksaan psikologi. Oleh karena itu, tenaga asisten psikologi yang ada di daerah melakukan pemeriksaan tes psikologi dan hasilnya dikirim ke psikolog di pusat. Laporan diagnosa tetap dikerjakan oleh psikolog. Kendalanya adalah membutuhkan waktu dan juga biaya operasional yang cukup tinggi.



7. Apakah pengaturan dalam RUU sudah tepat untuk mengatur Lembaga Layanan Praktik Psikologi di daerah?

Sudah tepat, karena sudah mencakup 4 lulusan psikologi dengan masing-masing kewenangan praktik psikologi yang sudah diatur



8. Bagaimana peran Ikatan Alumni Fakultas Psikologi terhadap layanan praktik psikologi? Apakah pengaturan dalam RUU sudah tepat untuk menjamin mutu layanan praktik psikologi?

- ▶ Ikatan Alumni sangat berperan penting terhadap layanan praktik psikologi .
- ▶ Pada ikatan alumni terkumpulnya para lulusan yang belum tentu telah memiliki STR ataupun SIPP, namun tanpa mereka sadari ketika menjalankan tugas di perusahaan, peran yang dijalankan adalah praktik psikologi . Mereka tidak menyadari bahwa untuk praktik psikologi kewenangannya dilandasi oleh surat izin praktik atau yang atau yang disingkat SIPP.
- ▶ Kedepan mereka wajib memiliki STR dan SIPP sesuai amanat UU praktik psikologi agar masyarakat penerima layanan terlindungi.



9. Apa kendala dan solusi atas permasalahan praktik psikologi di Indonesia? Apakah substansi pengaturan dalam RUU sudah menjawab kendala tersebut

Permasalahan praktik psikologi yang ada selama ini, al :

1. Pembukaan kursus tes psikologi untuk mengikuti seleksi pada penerimaan siswa baru.
2. Tes kesiapan masuk sekolah Dasar dilakukan oleh yang tidak mempunyai kewenangan, karena pengambilan datanya ia pahami, seperti dilakukan oleh guru atau petugas sekolah.
3. Pembuatan laporan psikologi yang bukan merupakan kewenangannya, sehingga sulit dipahami oleh pemakai jasa psikologi
4. Penanganan kasus tertentu yang bukan merupakan kompetensinya (kasus yang memerlukan keahlian khusus)

Dengan RUU praktik psikologi, diatur praktik psikologi dan kewenangannya sehingga mengikat pada semua orang. Permasalahan 1 sd 4 akan terpecahkan dengan adanya RUU praktik psikologi.



10. Mohon masukan terhadap substansi atau materi pokok pengaturan dalam RUU Praktik Psikologi? (*draf RUU terlampir*)

Perlu harmonisasi terhadap undang-undang yang ada yang mengatur atau menyebutkan praktik psikologi, asisten psikolog, psikolog, Psikolog praktek dengan keahlian khusus yang dikoordinir oleh HIMPSI

Selain itu, psikologi dibutuhkan oleh setiap kalangan yang terlihat adanya ikatan dan asosiasi yang beragam sesuai peminatan. Hal tersebut justru menunjukkan adanya sifat penting yang mendesak agar praktik-praktik psikologi dapat menjalankan tugasnya dengan nyaman secara terkontrol di lapangan.



ASPIRASI APSI

- ▶ MOHON AGAR RUU PRAKTIK PSIKOLOGI DAPAT SEGERA DISAHKAN MENJADI UU

